

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI PROGRAM TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK  
(Studi : Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**EBEN EZER SIANTURI**

**NPM : 127310504**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2019**

5. Bapak Syaprianto, S.Sos M.IP Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini
7. Terkhususnya ku Persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta, beserta kakak dan adek-adek tercinta, yang tak henti-henti nya memberikan doa motivasi dan dukungan baik secara moril maupun secara materil selama penulis menyelesaikan studi.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin.

Akhirnya Penulis berharap semoga Penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 10 Mei 2019  
Penulis  
Ttd.

Eben Ezer Sianturi

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>

<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
1. Tujuan Penelitian .....	19
2. Manfaat Penelitian .....	19
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	20
1. Konsep Pemerintahan .....	20
1.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah.....	24
1.2 Asas Dekokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan.....	26
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	30
3. Konsep Kinerja Pemerintahan .....	31
4. Konsep Evaluasi Kebijakan .....	36
4.1 Jenis-Jenis Evaluasi .....	41
4.2 Proses Evaluasi .....	42
4.3 Fungsi Evaluasi.....	43
5. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan .....	44
6. Konsep Kemiskinan.....	46
7. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 .....	49
B. Penelitian Terdahulu .....	49
C. Kerangka Pikir .....	50
D. Konsep Operasional .....	51
E. Operasional Variabel .....	53
F. Tekhnik Pengukuran .....	54
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel.....	58
D. Teknik Penarikan Sampel .....	59
E. Jenis dan Sumber Data.....	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	63
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
B. Gambaran Umum Kabupaten Siak .....	64

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	69
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	69
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia .....	70
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	71
B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu) .....	73
1. Efektifitas .....	73
2. Efisiensi .....	76
3. Kecukupan .....	79
4. Pemerataan .....	82
5. Responsivitas .....	84
6. Ketepatan .....	86
C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu) .....	88
D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dalam Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu .....	91
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	4
I.2	: Daftar Nama Penerima Bantuan Rumah APBN Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.....	12
I.3	: Daftar Usulan Rumah Layak Huni Program Sejuta Rumah Layak Huni Presiden Indonesia Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016-2017.....	15
II.1	: Penelitian Terdahulu Terkait valuasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.....	50
II.2	: Operasionalisasi Variable Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.....	53
III.1	: Populasi Dan Sampel Evaluasi Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.....	59
III.2	: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.....	63
IV.1	: Penyebaran Populasi Penduduk Kabupaten Siak Provinsi Riau	67
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	70
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	71
V.3	: Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	72
V.4	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	74
V.5	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	77
V.6	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	79

V.7	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	82
V.8	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	84
V.9	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	87
V.10	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Mempura Terkait Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi:Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	89

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Fikir Mengenai Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu).....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuesioner Masyarakat Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	97
2 : Daftar Wawancara Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	107
3 : Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	108
4 : Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	111
5 : Dokumentasi Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terkait dengan judul Penelitian Tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	118
6 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Dengan Judul Penelitian Tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	119
7 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir Terkait Judul Penelitian Tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	120
8 : Surat Balasan Dari Kantor Camat Mempura Terkait Dengan Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)	121



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eben Ezer Sianturi  
NPM : 127310504  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Mei 2019  
Pelaku Pernyataan,

Eben Ezer Sianturi

# Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)

## ABSTRAK

Oleh  
Eben Ezer Sianturi

Kata Kunci : Evaluasi, Kemiskinan, Bantuan Rumah Layak Huni, Desa Benteng Hulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu). Indikator dari penelitian ini adalah Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Mempura, Desa Benteng Hulu ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Camat Mempura, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni dari total Jumlah Masyarakat yang di Targetkan oleh kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah Teknik Sensus untuk populasi Camat dan teknik *accidental sampling* untuk kelompok populasi masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu) mendapatkan jawaban pada kategori “Cukup Baik”. Dimana harapan penulis dikemudian hari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah akan semakin baik untuk kedepannya, khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan rumah layak huni.

***Evaluation of the Poverty Reduction Team Program in Mempura Subdistrict, Siak Regency (Study: Home Assistance Program in Benteng Hulu Village)***

ABSTRACT

By

*Eben Ezer Sianturi*

*Keywords: Evaluation, Poverty, Assistance for Livable Houses, Fort Hulu Village*

*This study aims to determine the Poverty Reduction Team Program in Mempura Subdistrict, Siak Regency (Study: Home Assistance Program in Benteng Hulu Village). The indicators of this study are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. This type of research located in Mempura Sub district, Benteng Hulu Village is a Descriptive Survey, which prioritizes questionnaire lists as a means of collecting data and data collected with this tool which is then used as the main raw material for analyzing empirical conditions of the objectivity of research objectives in the studied locations. . The population used in this study was the Head of Mempura, the Regional Poverty Coordination Team, the community that received housing assistance from the total number of people targeted by the district of Mempura, Siak Regency. The sampling technique used in determining sample individuals is the Census Technique for the Camat population and accidental sampling techniques for community population groups, the types and data collection techniques used in this study consist of, primary data collected using questionnaires and interviews as well as secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the research entitled Evaluation of the Poverty Reduction Team Program in Mempura Subdistrict, Siak Regency (Study: Home Assistance Program in Benteng Hulu Village) received answers in the "Good Enough" category. Where the author's hopes in the future that the services provided to the community with a low economic level will be better for the future, especially those relating to the provision of decent housing.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah seperti kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota di bagi lagi menjadi daerah-daerah kecamatan yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantunya.

Tujuan Negara merupakan suasana ideal yang dicita-citakan dan bersifat abstrak, tujuan Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mencerminkan dari rumusan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan.

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri.

Negara menurut Kranenburg (dalam Syafie 2010 : 79) adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan dan maksud, maka dalam Negara Indonesia dibentuklah pemerintahan yang diharapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003 : 7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil. Oleh karena itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat, seperti Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014). Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan pada pasal 2,3,dan 4:

**Tabel I.1 : Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah	
Pasal-Pasal	Ayat
Pasal 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten dan kota.</li> <li>2. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan di bagi atas kelurahan dan/atau Desa.</li> </ol>
Pasal 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Merupakan daerah masing-masing mempunyai pemerintah daerah.</li> <li>2. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh undang-undang.</li> </ol>
Pasal 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Provinsi Selain Berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administrative yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di wilayah daerah provinsi.</li> <li>2. Daerah kabupaten atau kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.</li> </ol>

Sumber : Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Tabel I.1 di atas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah di atur tentang tugas-tugas masing-masing daerah yang ada di Indonesia, dimana dari posisi paling tinggi

hingga posisi paling terendah, dan dimana dalam hal ini termasuk juga posisi dari Kecamatan sebagai bagian dari focus penelitian yang sedang penulis kerjakan.

Dan yang menjadi urusan wajib pemerintah adalah yang tertuang dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah adalah: Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksudkan adalah:

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perindungan Masyarakat.
- f. Sosial.

Dari penjelasan di atas terdapat tentang urusan pemerintah wajib yang diberikan kepada masyarakat dan menjadi tugas pokoknya dalam pelaksanaan pelayanan. Salah satu yang menjadi berkaitan dengan fokus penelitian penulis adalah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Hal ini disebabkan karena masih banyak perumahan rakyat yang belum layak huni untuk mendapatkan hal sosialnya karena ekonomi kehidupan masyarakat yang kurang mampu untuk mencukupi sandang pangan dan papan mereka. Ini menjadi salah satu objek yang harus di selesaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan absolut yang artinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian istilah lainnya adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksana otonomi Daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Arti dari urusan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang



pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan sosial.

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat. Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari pembentukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Otonomi daerah merupakan upaya nyata untuk mewujudkan suatu efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta memberika pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga sesuai dan fokus pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kompetensi dan kualitas aparatur Negara atau pegawai sebagai abdi Negara dan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah

untuk mengelola kekayaannya, maka setiap daerah diwajibkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota.

Di dalam penelitian dibahas tentang pemerintahan Kabupaten Siak. Untuk menjalankan urusan pemerintah wajib, maka pemerintahan Kabupaten Siak ini memiliki program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak yang berfokus pada pemberian bantuan perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Siak dan Tata Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan, adapun program-program yang terdapat di dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya.

Dari ke empat program dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak ini, penulis lebih memfokuskan pada program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, di dalam program ini berdasarkan pasal 16 terdapat 5 pembagian program yaitu:

1. Bantuan pangan dan sandang
2. Bantuan kesehatan
3. Bantuan pendidikan
4. Bantuan perumahan
5. Bantuan perlindungan rasa aman.

Dari ke lima poin tersebut penulis mengambil pada poin bantuan perumahan, hal ini diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 pasal 20 yaitu Program bantuan perumahan.

Pembiayaan program bantuan perumahan bagi rakyat ini sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dikabupaten

Siak pada pasal 36 dibiayai:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten dan;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Di dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yaitu memberi bantuan rumah layak huni, maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD yang di dalam Timnya yaitu:

- a. Pemerintah Daerah,
- b. Masyarakat,
- c. Dunia Usaha,
- d. Dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

Pemerintah daerah ini termasuk di dalamnya adalah Camat beserta jajarannya. Karena Peran Camat dalam hal ini adalah mengawasi dan membina penyelenggaraan kegiatan di desa dan/atau Kelurahan karena camat berkedudukan di bawah tanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 tentang Camat, yaitu:

- a) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan Sarana pelayanan Umum;
- f) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kampung dan/atau kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan

dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat. Dalam hal pelimpahan wewenang untuk menjalankan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yaitu seperti pemberian bantuan perumahan layak huni kepada masyarakat yang kurang mampu camat mengkoordinasikan kepada kepala desa untuk merekap data-data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan, dan pihak desa mengkoordinasikan kepada pihak LSM setiap RT/RW, dan pihak LSM tentunya bekerja sama dengan pihak RT/RW untuk mendata masyarakat yang kurang mampu khususnya dalam kawasan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak adalah kabupaten yang terdapat di dalam Provinsi Riau yang mana masalah perumahan rakyat pada saat ini masih jauh dari harapan. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556.09 KM<sup>2</sup>, yang terdiri dari 14 Kecamatan dan jumlah penduduk mencapai 408.034 Jiwa, yang terdiri atas 211.717 Laki-laki dan 196.317 Perempuan. Dan salah satu dari 14 kecamatan yang penulis sebutkan di atas adalah Kecamatan Mempura, kecamatan ini pulalah yang mendapatkan bantuan program bantuan rumah yang di gagas oleh pemerintah Kabupaten Siak, Kecamatan Mempura memiliki Jumlah penduduk mencapai 14.119 Jiwa yang tersebar di dalam 7 Kelurahan/atau Desa. Dari seluruh desa yang ada di kecamatan Mempura Kabupaten Siak, penulis mengambil Study Kasus pada satu desa yang jumlah penduduknya menjadi salah satu yang terbanyak dari desa desa lainnya, yaitu desa Benteng Hulu, jumlah penduduk di Desa Benteng Hulu berjumlah sebanyak 3.144 Jiwa yang mana dari jumlah tersebut masih ada puluhan bahkan ratusan masyarakat yang berada pada

tingkat ekonomi menengah kebawah dan itu layak mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Siak.

Dan dari jumlah penduduk yang penulis sebutkan di atas, penulis mendapatkan data dari pihak Kecamatan Mempura mengenai Masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah Kabupaten Siak di Desa Benteng Hulu, dan data penduduk tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2 : Daftar Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak 2016-2017**

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1	Adnan	RT, 001, RK, 001
2	Supardi	RT,001, RK, 001
3	Zulroydi	RT, 001, RK, 001
4	Pasbiun	RT, 001, RK, 001
5	Prayitno	RT, 001, RK, 001
6	Narsum	RT, 004, RK, 002
7	Darwis	RT, 001, RK, 001
8	Farida	RT, 001, RK, 001
9	Burhan	RT, 001, RK, 001
10	Sunarman	RT, 010, RK, 003
11	Sutikno Slamet	RT, 002, RK, 001
12	Satimin	RT, 002, RK, 001
13	Abdullah	RT, 002, RK, 001
14	Gunardy	RT, 002, RK, 001
15	Irmawati	RT, 002, RK, 001
16	Yusmini	RT, 002, RK, 001
17	Suwandi	RT, 004, RK, 002
18	Sulastri	RT, 003, RK, 001
19	Muhidin	RT, 003, RK, 001
20	M.Ali	RT, 004, RK, 002
21	Neliyana	RT, 007, RK, 003
22	Nurainun	RT, 004, RK, 002

23	Rahman	RT, 005, RK, 002
24	Parto	RT, 005, RK, 002
25	Ponidi	RT, 005, RK, 002
26	Sarinah	RT, 005, RK, 002
27	Ibrahim	RT, 005, RK, 002
NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
28	Maman	RT, 007, RK, 003
29	Zainab	RT, 006, RK, 002
30	Syafniar	RT, 007, RK, 003
31	Halimah	RT, 007, RK, 003
32	Rusni Harahap	RT, 008, RK, 003
33	Ahmad Sodikin	RT, 007, RK, 003
34	Lastari	RT, 007, RK, 003
35	Arpan	RT, 007, RK, 003
36	Ramadan	RT, 007, RK, 003
37	Suminem	RT, 003, RK, 001
38	Tujiono	RT, 008, RK, 003
39	Sudiro	RT, 012, RK, 004
40	Muhamad Amin	RT, 008, RK, 003
41	Suroso	RT, 008, RK, 003
42	Sukriyanto	RT, 011, RK, 004
43	Moh. Ihsan	RT, 009, RK, 003
44	Sail	RT, 011, RK, 004
45	Radiman	RT, 011, RK, 004
46	Edi.S	RT, 011, RK, 004
47	Kuatman	RT, 011, RK, 004
48	Lamiyati	RT, 011, RK, 004
49	Darmin	RT, 011, RK, 004
50	Izhar	RT, 011, RK, 004
51	Ramli	RT, 011, RK, 004
52	Riono	RT, 008, RK, 003
53	Barno	RT, 010, RK, 003

54	Edi Suheri	RT, 012, RK, 004
55	Karman	RT, 012, RK, 004

Sumber : *Desa Benteng Hulu Kabupaten Siak tahun 2016*

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah dan juga daftar nama-nama yang berhak menerima bantuan renovasi rumah layak huni yang ada di Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut merupakan ketentuan dari pihak RT/RW yang dilaporkan kepada kepala Desa, setelah itu kepala Desa akan mengajukan kepada pihak Kecamatan atau kepada Camat. Akan tetapi dari semua daftar yang telah penulis paparkan di atas, belum secara keseluruhan mendapatkan dampak dari program yang dijalankan oleh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Realisasi pengerjaan rumah yang dijanjikan kepada masyarakat sangatlah lambat dan terbilang tidak serius, dengan observasi awal yang penulis lakukan di Desa Benteng Hulu, penulis menemukan bahwa rumah-rumah masyarakat yang masih sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak untuk hunian. Dengan demikian maka penulis akan mencoba melakukan penelitian terhadap Kinerja yang ada di satuan kantor Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dimana dalam hal ini di tunjuk sebagai pelaksana dan juga penanggung jawab sekaligus pengawas program tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kantor Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang tempat tinggal layak huni, pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak telah melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan mendapatkan data mengenai data masyarakat yang layak untuk diberikan sumbangan pembangunan bantuan rumah layak huni, dan adapun data terkait dengan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari tahun 2016 – 2018 adalah berikut ini:

**Tabel I.3 : Daftar Usulan Rumah Layak Huni Program Sejuta Rumah Layak Huni Presiden Indonesia Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016-2018.**

NO	Kelurahan	Pemilik	Kondisi	Status
1	2	3	4	5
1	Merempam Hilir	Tusinok	Tidak Baik	Hak Milik
2	Merempam Hilir	Siti Marjanah	Kurang Baik	Hak Milik
3	Merempam Hilir	M.Kolit	Tidak Baik	Hak Milik
4	Merempam Hilir	Burhan Efendi	Tidak Baik	Hak Milik
5	Merempam Hilir	Bakum	Kurang Baik	Hak Milik
6	Merempam Hilir	Samri	Kurang Baik	Hak Milik
7	Merempam Hilir	Nasrun	Kurang Baik	Hak Milik
8	Merempam Hilir	Nurasiah	Kurang Baik	Hak Milik
9	Merempam Hilir	Abdul Malik	Kurang Baik	Hak Milik
10	Merempam Hilir	M.Suar K	Kurang Baik	Hak Milik
11	Merempam Hilir	Hendra	Kurang Baik	Hak Milik
12	Merempam Hilir	Amah	Tidak Baik	Hak Milik
13	Merempam Hilir	M. Alimuddin	Tidak Baik	Hak Milik
14	Merempam Hilir	Syafi'i	Kurang Baik	Hak Milik
15	Merempam Hilir	Zul Astri	Tidak Baik	Hak Milik
16	Merempam Hilir	Darman	Tidak Baik	Hak Milik
17	Merempam Hilir	Agil Lusiananto	Kurang Baik	Hak Milik
18	Merempam Hilir	Hermanto	Kurang Baik	Hak Milik
19	Merempam Hilir	Saripah	Tidak Baik	Hak Milik
20	Merempam Hilir	Fatimah	Kurang Baik	Hak Milik
21	Merempam Hilir	Sunardi	Tidak Baik	Hak Milik
22	Merempam Hilir	Kunmardiono	Tidak Baik	Hak Milik
23	Merempam Hilir	Dodi	Tidak Baik	Hak Milik
24	Merempam Hilir	Mujiono	Tidak Baik	Hak Milik
25	Merempam Hilir	Abri	Kurang Baik	Hak Milik
26	Merempam Hilir	Safri	Kurang Baik	Hak Milik
27	Merempam Hilir	Isa Albakari	Tidak Baik	Hak Milik
28	Merempam Hilir	Basri	Kurang Baik	Hak Milik
29	Merempam Hilir	Situ	Kurang Baik	Hak Milik
30	Merempam Hilir	Farida	Kurang Baik	Hak Milik
31	Merempam Hilir	Joni Safrin	Tidak Baik	Hak Milik
32	Merempam Hilir	Jakfar Umar Said	Kurang Baik	Hak Milik
33	Merempam Hilir	Sunardi	Tidak Baik	Hak Milik
34	Merempam Hilir	Asrul	Kurang Baik	Hak Milik
35	Merempam Hilir	Joni Faisal	Kurang Baik	Hak Milik
36	Kelurahan Paluh	Jumatun	Rusak Parah	Hak Milik
37	Kelurahan Paluh	Yeni Saputra	Rusak Parah	Hak Milik
NO	Kelurahan	Pemilik	Kondisi	Status
1	2	3	4	5
38	Kelurahan Paluh	Saniah	Rusak Parah	Hak Milik
39	Kelurahan Paluh	Ujang Leman	Rusak Parah	Hak Milik
40	Kelurahan Paluh	Saprin	Rusak Parah	Hak Milik



41	Kelurahan Paluh	Efendi	Rusak Parah	Hak Milik
42	Kelurahan Paluh	Slamat Damanik	Rusak Parah	Hak Milik
43	Kelurahan Paluh	Ariadi	Rusak Parah	Hak Milik
44	Kelurahan Paluh	Neli Aswar	Rusak Parah	Hak Milik
45	Kelurahan Paluh	Muktar	Rusak Parah	Hak Milik
46	Kelurahan Paluh	Abdul Muis	Rusak Parah	Hak Milik
47	Kelurahan Paluh	Erman	Rusak Parah	Hak Milik
48	Kelurahan Koto Ringin	Romansyah	Tidak Layak	Hak Milik
49	Kelurahan Koto Ringin	Syahrizon Gusrial	Tidak Layak	Hak Milik
50	Kelurahan Koto Ringin	Ramadhan	Tidak Layak	Hak Milik
51	Kelurahan Koto Ringin	Roy Dahlan S	Tidak Layak	Hak Milik
52	Kelurahan Koto Ringin	Samiatin	Tidak Layak	Hak Milik
53	Kelurahan Koto Ringin	Saminem	Tidak Layak	Hak Milik
54	Kelurahan Koto Ringin	Sutrisno	Tidak Layak	Hak Milik
55	Kelurahan Koto Ringin	Triyono	Tidak Layak	Hak Milik
56	Kelurahan Koto Ringin	Mu'in	Tidak Layak	Hak Milik
57	Kelurahan Koto Ringin	Joko Triyono	Tidak Layak	Hak Milik
58	Kelurahan Koto Ringin	Susmoro	Tidak Layak	Hak Milik
59	Kelurahan Koto Ringin	Suparto	Tidak Layak	Hak Milik
60	Kelurahan Koto Ringin	Zurokman	Tidak Layak	Hak Milik
61	Kelurahan Koto Ringin	Suroyo	Tidak Layak	Hak Milik
62	Kelurahan Koto Ringin	Tasmi	Tidak Layak	Hak Milik
63	Kelurahan Koto Ringin	Gatot Surtianti	Tidak Layak	Hak Milik
64	Kelurahan Koto Ringin	Reno Candra	Tidak Layak	Hak Milik
65	Kelurahan Koto Ringin	Syofian AS	Tidak Layak	Hak Milik
66	Kelurahan Koto Ringin	Saebun	Tidak Layak	Hak Milik
67	Kelurahan Koto Ringin	Hamzah	Tidak Layak	Hak Milik
<b>NO</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
68	Kelurahan Koto Ringin	Jumarif	Tidak Layak	Hak Milik
69	Kelurahan Koto Ringin	Irawadi	Tidak Layak	Hak Milik
70	Kelurahan Koto Ringin	Sudirman	Tidak Layak	Hak Milik
71	Kelurahan Koto Ringin	Sukiman	Tidak Layak	Hak Milik
72	Kelurahan Koto Ringin	Pujiani	Tidak Layak	Hak Milik

*Sumber : Kantor Kecamatan Mempura Tahun 2018*

Berdasarkan pada data yang penulis sajikan pada tabel di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa Daftar Usulan Rumah Layak Huni Program Sejuta Rumah Layak Huni Presiden Republik Indonesia Kecamatan Mempura Tahun Anggaran 2016-2018 Secara keseluruhan berjumlah sebanyak 352 Rumah, jumlah tersebut penulis dapatkan dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan mempura, dan pada tabel di atas penulis hanya menyajikan data bagian dari keseluruhan jumlah rumah yang telah berhasil di data oleh pihak Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, hal itu dikarenakan untuk mengurangi penyajian tabel yang ada pada Usulan Penelitian yang penulis sedang kerjakan, dan untuk data keseluruhan, penulis dapat sajikan pada lampiran Usulan Penelitian ini. Adapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan rumah adalah:

1. WNI yang sudah berkeluarga
2. Memiliki atau menguasai tanah namun belum memiliki rumah
3. Memiliki/menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
4. Belum pernah memperoleh bantuan rumah dari pemerintah

Berdasarkan gambaran umum yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat yang menerima bantuan perumahan di Desa Benteng Hulu kecamatan Mempura masih belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh program tersebut meskipun kondisinya sangat layak untuk di bantu melalui program perumahan tersebut.
2. Belum maksimalnya realisasi program bantuan Rumah Layak Huni yang akan pemerintah berikan kepada masyarakat yang membutuhkan yang mana hal tersebut di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dikabupaten Siak.

Berdasarkan fenomena fenomena yang seperti yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan mengangkat judul “Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Study : Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas , maka program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan rumah layak huni yang merupakan program dari Presiden, dan dikoordinasikan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang terdiri dari pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah Bupati yang di koordinasikan pada pihak Kecamatan atau Camat sebagai penanggung jawab di kecamatannya masing-masing. Dari penjelasan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Study : Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu) ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. (*Studi : Program Rumah Bantuan di Desa Benteng Hulu*).
  - b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dalam melaksanakan Program Rumah Bantuan di Desa Benteng Hulu.
2. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:
  - a. Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan bagi pembacanya, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang ilmu pemerintahan pada umumnya.

- b. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan, khususnya kepada Pemerintahan Kabupaten Siak.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan Perundangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan
3. Mencerdaskan kesejahteraan
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha, pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan,kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dana para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja oraganisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipenagruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi aka mendukung kepatuhan. Jika sema dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi relitas.

Kecamatan adalah wilayah kerca camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemberntukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selainitu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

### **1.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Menurut perspektif Kybernologi, Ndraha (2005;192) Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat. Dibentuknya suatu system pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisipasikan dan layanan Civil termasuk layanan birokrasi.

Rasyid (1998;102) Fungsi pemerintah dibagi empat bagian, yaitu: Pelayanan (*Publik Sevice*), Pembangunan (*Development*), Pemberdayaan (*Empowering*), dan pengaturan (*Regulation*). Dengan mengutip Rosecelt dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat



membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa public bersifat kolektif, karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu. Dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sinambela (1992;198) pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara sktream dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia. Hal senada juga di ungkapkan oleh Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *Life xyle leadership (LCTL)*, bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi sering dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin berkurang atau menurun.

Osborne dan Plastrik (2004;322) mencirikan pemerintah (demokrat) sebagai mana di harapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat di berdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan public akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus di bangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi

lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

## **1.2 Asas Demokrasi dan Asal Tugas Pembantu dalam Penyelenggaraan Pemerintah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Demokrasi dan tugas pembantuan dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di selenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asal desentralisasi, disamping itu sebagai konsekuensinya Negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan seklipun kepada daerah.

Pelaksanaan asal dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan di daerah atau di Provinsi, Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku walil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam membina dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Terpeliharanya keutuhan Negara kesatuan repunlik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah di daerah;
- d. Teridentifikasinya potensi dan terpilihnya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pegolahan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari system dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang member penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asal desentralisasi dan asal dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah da desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota, penyelenggaraan ketigasa sebagaimana di uraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah di serahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus di danai dari APBD, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah harus di danai dari APBN melalui bagian anggaran kementrian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan di limpahkan kepada gubernur berdasarkan asas daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah merupakan suatu system yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, demokrasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang di uraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantu menjadi sangat penting untuk di berikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif, berikut akan di jabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan tugas mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, seta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (PP7/2008), Meliputi:

- a. Pelimpahan Urusan Pemerintahan;
- b. Tata cara pelimpahan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 Meliputi:

- 1) Prinsip Pendanaan.
- 2) Perencanaan dan penganggaran.
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik Negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggung jawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan Dekonsentrasi; dan
- b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP/2008 Meliputi:

- a. Penugasan urusan pemerintahan;
- b. Tata cara penugasan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam pasal 8 PP/2008 Meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik Negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggung jawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam pasan 8 PP/2008 Meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan pasal 11 PP/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur, (2) selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula di limpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat pemerintahan daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

## **2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah: Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan republic Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada asas otonomi dan asas tugas pembantuan, asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah penyerangan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam system NKRI. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertical diwilayah tertentu (Pasal 1 ayat 8).

Adapun hal yang dapat di laksanakan dengan tugas pembantuan adalah:

1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat;
2. Urusan secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat;
3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah;
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.

Otonomi dalam bahasa Indonesia adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Adapun arti penting dari otonomi bagi daerah yakni daerah diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemampuan yang di miliki oleh daerah tersebut. Sehingga dengan adanya otonomi daerah tersebut, daerah dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki di daerah tersebut baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

### **3. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Menurut Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for whole* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan menurut Nugroho (2008: 58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Selanjutnya Dunn mengartikan kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003:132).”

Menurut David Easton (dalam Anggara: 2014:35) kebijakan Publik adalah mengalokasikan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Dye (dalam Indiahono: 2009: 17) kebijakan haruslah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Dye dalam Islamy (2000:19) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama. Dalam arti ini, maka kebijakan publik adalah: usaha untuk memahmi dan memberi arti tentang apa yang:

1. Dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah
2. Menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya
3. Menjaga dampak dari kebijakan publik tersebut

Selanjutnya Easton dalam Agustino (2006:19) memberikan definisi kebijakan publik “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa

hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah secara sah dapat berbut sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan oleh pemerintah termasuk para penguasa dalam politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu.

Berdasarkan pendapat berbagai para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu tertuang biasanya tertuang dalam-dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sebagai sifat yang memikat dan memaksa.

Kemudian menurut Youg dan Quinn (dalam Suharto, 2005: 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangannya hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah tiada dan karenanya tidak memerlukan.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa di buat beberapa perwakilan lembaga pemerintah.



Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam tesis Wardan Amdan (2014:21) adalah sebagai berikut:

- a) Tahap Penyusunan Agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak di sentih sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap Formulasi Kebijakan  
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) Tahap Adopsi Kebijakan  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d) Tahap Implementasi Kebijakan  
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
- e) Tahap Evaluasi Kebijakan  
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat.

#### 4. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menurut Echols dan Shadily (2002:220) adalah bagian dari sistem manajemen yaitu: perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa ada evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata sarapan dari bahasa inggrisnya yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penafsiran.

Menurut Suharto (2008:80) , evaluasi dapat dilakukan terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan, maksudnya adalah:

Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan di jadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Menurut Subarsono (2009;120) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
- b. Mengikuti tingkat evaluasi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
- c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target
- f. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Siagian (2006;117) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang harusnya dicapai. Lebih lanjut dijelaskan oleh Siagian bahwa yang perlu diperhatikan dalam evaluasi (penilaian) yakni :

1. Bahwa penilaian adalah fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati atau hidupnya suatu organisasi
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya di capai dengan hasil yang seharusnya di capai.

Evaluasi menurut Al Amin (2006;10) merupakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran pelaksanaan kegiatan dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan evaluasi kebijakan yang merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilaksanakan setelah

kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisiennya.

Evaluasi menurut Ndraha (1999;21) yaitu perbandingan antara tujuan yang hendak di capai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisis akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sedangkan menurut Ahmad (2007;133), mengatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan,kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses,orang,obyek,dll) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.

Menurut Zean Badudu (2001;402) evaluasi adalah penilaian atau memaksa untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya (cukup baik atau buruk). Selanjutnya menurut Siagian faktor-faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut adalah :

1. Terciptanya sasaran yang ditetapkan di capai
2. Tersedianya dana dan prasarana yang diperlukan
3. Pengetahuan dan keterampilan manajerial yang mutakhir, tidak ketinggalan zaman yang sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal
4. Keunggulan produk organisasi sehingga para pesaing tersebut dapat menandingkannya
5. Loyalitas desikasi, dan semangat kerja yang tinggi dari para pelaksanaan berbagai kegiatan operasional
6. Interaksi positif antara berbagai bantuan kerja yang menumbuhkan kerja sama yang intim dan serasi
7. Tepatnya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan, misi, sasaran jangka panjang dan strategi induk organisasi
8. Diwaspadai juga kemungkinan diraih juga keberhasilan semua dan arti bahwa keberhasilan yang diraih itu hanya karena sasaran dan standar mutu kerja yang ditentukan terlalu rendah, sehingga tanpa upaya yang maksimalpun, keberhasilan pun akan di capai juga.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Selanjutnya adalah bagaimana mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut, jadi evaluasi adalah kebijakan publik harus dipahami sebagaimana suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan mencari kekurangan dan menutupi kekurangan tersebut.

Tujuan-tujuan dari evaluasi kinerja menurut Mangkunegara (2005;10) adalah untuk sebagai berikut :

1. Meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu
3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang diinginkan.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, Output dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67 )

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- 1) Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- 2) Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- 3) Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Adapun langkah-langkah Evaluasi yang dapat di lakukan menurut teori Ndraha (2003;185) adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Standar (kendali,s) beberapa standar, das solen, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data tes dengan data control.
2. Memantauan factor (f)
3. Perbandingan F dan S
4. Hasil Perbandingan  $F=S, F<S, FS$ .
5. Analisa Perbandingan berdasarkan model-model di atas.
6. Tindak Lanjut.
  - a. Tindak Korektif

- b. Tindak Afirmitif
- c. Feedback.

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008;2), bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya Winarno (2007: 230) mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di Evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126), mencakup lima indikator yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka

6. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan-tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan mengeluarkan tugas yang dilaksanakan.

Menurut Waldo dalam Sufian (2003;13) organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Lebih jelas lagi organisasi menurut Persone dalam Syamsiar (2006;20) menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu unit (atau pengelompokan manusia) yang sengaja mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Organisasi menurut Siagian (2006;3) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Atau lebih dikenal dengan tingkatan manajemen dalam organisasi, yang terdiri dari Top manajemen, Leader manajemen dan Lower manajemen.

#### **4.1 Jenis-jenis Evaluasi.**

Jika di lihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat di bagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan.

Kata evaluasi sering di gunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternative dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin di capai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang di nilai dengan yang di analisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding rencana tapi hasil pelaksanaan disbanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin di capai.

#### 4.2 Proses Evaluasi.

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus di dasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain:

1. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus di hindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah di cantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.

4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu di konsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

### 4.3 Fungsi Evaluasi.

Wahad (2002;51) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi member informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat di capai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat member sumbangan pada perumusan kebijakan.

Dunn (2000;187) berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat di lihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi, yaitu:

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah di capai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.



2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat di jelaskan.

## 5. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi melanjutkan pemerintahan umum dan melayani masyarakat luas dalam ruang lingkup wilayah kecamatan. Maka dari itu, camat sebagai pemimpin Kecamatan harus mampu mengarahkan segala potensi yang ada agar terlaksananya tata pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kecamatan secara moral dan faktual ikut bertanggung jawab atas kelancaran jalannya roda pemerintahan di daerah demi keberhasilan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya, harus benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kecamatan harus memperhatikan apakah kebijakan-kebijakannya telah sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, menguntungkan dan mengutamakan kepentingan rakyat, serta memperdulikan rasa keadilan.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kabupaten/kota. Kecamatan terdiri dari desa-desa dan kelurahan. Pada ayat (1) pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah :

- a. Pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi
- b. Pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan pula bahwa:

1. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaimana wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Selanjutnya di dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dijelaskan tugas umum pemerintahan Kecamatan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan

Adapun tata kerja dan hubungan kerja pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur di dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya
2. Camat mengkoordinasi unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan
3. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan.

Kemudian di dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, juga dijelaskan tentang tata kerja dan hubungan kerja pemerintahan kecamatan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional
2. Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional

3. Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitas.

## 6. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman atas kondisi kemiskinan yang dihadapi (krisnamurthi, 2006), yaitu: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (*garis kemiskinan*) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

World Bank (2001) juga mendefinisikan kemiskinan sebagai ketercabutan dari kehidupan yang layak. Miskin adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang dan kurang pendidikan. Menurut defenisi ini, orang menjadi miskin bukan karena kelemahan mereka, namun karena hal itu terjadi diluar kendali mereka. Biasanya, karena kebijakan yang buruk dari institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhatikan suara mereka.

Sedangkan menurut Jhinghan (2000 ; 43) terdapat tiga ciri utama pada negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari terjadinya kemiskinan. Ciri pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi

terhambat. Ciri ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. Hal ini terjadi karena penduduk tidak memiliki pilihan lain. Kepemilikan tanah rata-rata per petani cukup sempit dan sebagai akibatnya mereka terpaksa hidup pada tingkat yang hanya cukup untuk sekedar hidup.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2004).

Definisi mengenai kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga definisi kemiskinan dengan mempertimbangkan komponen sosial dan moral. Kemiskinan dapat diartikan suatu kondisi serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan, dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, pendidikan dan keahlian rendah, keterkucilan sosial karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Singkatnya, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan,1984)

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional artinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi tapi juga dapat dilihat dari segi sosial, budaya, dan politik. Definisi kemiskinan ini semakin berkembang sesuai dengan penyebabnya. Papilaya (2006) mengemukakan bahwa pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan tetapi mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Disamping itu, beberapa peneliti berpendapat berbeda tentang kemiskinan struktural dan kemiskinan kronis dengan klasifikasi yang telah dilakukan Krisnamurthi (2006).

#### **7. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Pasal 2 tentang Penanggulangan Kemiskinan**

Setiap daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya masing-masing atau disebut juga dengan otonomi daerah. Salah satu yang menjadi wewenang masing-masing daerah yaitu masalah peningkatan perekonomian atau penanggulangan kemiskinan. Salah satu daerah Riau yang memiliki program untuk mengurangi kemiskinan yaitu daerah Kabupaten Siak. Di dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Siak membuat kebijakan yang tercantum dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi: Penanggulangan kemiskinan berdasarkan Azas:

- a. Partisipatif
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Keadilan Sosial, dan
- e. Berkelanjutan

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Sial (Studi: Program Bantuan Rumah di Desa Benteng Hulu).**

Nama Peneletian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Atika Zahra Maulida.  Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, Banjarmasin.	Analisis Strategi Dan Evaluasi Kinerja Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Pembangunan Desa Perspektif Ekonomi Mikro Islam	2016	Persamaan Penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah Objek penelitian yang berfokus kepada pengentaraan dan penanggulangan Kemiskinan.	Perbedaan yang ada antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah dari segi judul, waktu dan lokasi penelitian.

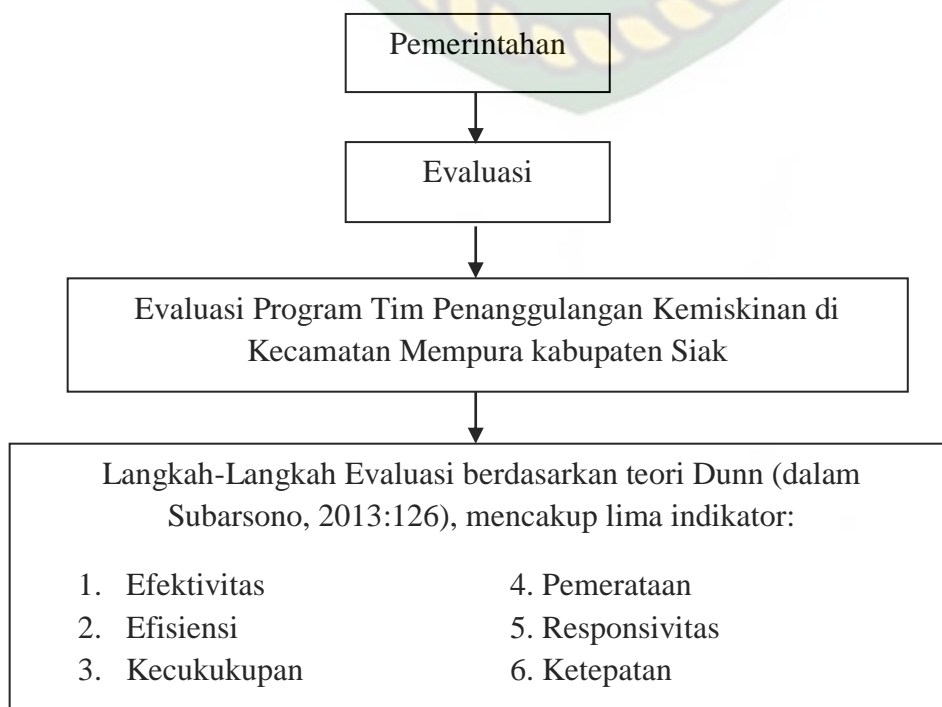
<p>Isnan Murdiansyah</p> <p>STIE Widya Gama Lumajang</p>	<p>Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Program Gerdu Taskin di Kabupaten Malang)</p>	<p>2014</p>	<p>Persamaan antara penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian terdahulu ini adalah focus penelitian yang ada pada program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Sementara perbedaan yang ada antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dari segi waktu, lokasi, universitas, dan juga Dinas atau aparatur pemerintah yang menjadi tempat penelitian penulis.</p>
--	---	-------------	---	--

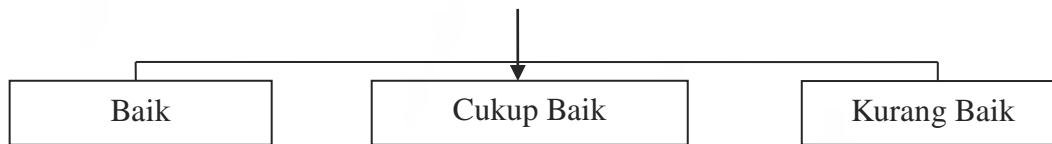
Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

### C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka piker dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Tim Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Mempura.**





*Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019*

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mengoperasikan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini :

- 1) Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah
- 2) Evaluasi adalah perbandingan antara tujuan yang hendak di capai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang terjadi sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisis akhir apakah suatu kejadian harus direvisi atau dilanjutkan.
- 3) Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.
- 4) Indikator Variabel Evaluasi Adalah:
  - a) Efektivitas. adalah apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.



- b) Efisiensi. berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
- c) Kecukupan. seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
- d) Pemerataan. apakah budaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- e) Responsivitas. apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
- f) Ketepatan. Apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

**E. Operasional Variabel**

**Tabel II.1 : Konsep Operasional Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skla pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah perbandingan antara tujuan yang hendak di capai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat di simpulkan dengan analisis akhir suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan (Ndraha,1999; 21)	Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.	1. Efektifitas	a. Melakukan sosialisasi terakait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan rumah layak huni b. Melakukan pemeriksaan Secara Langsung terhadap rumah bantuan.	Nominal
		2. Efisiensi	a. Ketersediaan anggaran/biaya dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan b. Menyelesaiakan rumah bantuan dengan tepat waktu.	Nominal
		3. Kecukupan	a. Menyediakan SDM atau Tim dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan b. Rumah Bantuan Memiliki Kualitas Layak Huni.	Nominal

		4. Pemerataan	a. Pelaksanaan Survey Untuk Memastikan Kondisi Rumah Masyarakat yang Akan Mendapatkan Bantuan. b. Program Rumah Layak Huni Dilaksanakan Dengan Adil Dan Merata.	
<b>Konsep</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Skla pengukuran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Evaluasi adalah perbandingan antara tujuan yang hendak di capai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat di simpulkan dengan analisis akhir suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan (Ndraha,1999; 21)	Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.	5. Responsivitas	a. Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Program. b. Melakukan Evaluasi Kerja, Baik Terhadap TIM maupun Fisik Pembangunan.	Nominal
		6. Ketepatan	a. Pelaksanaan Program Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku. b. Program rumah Layak Huni tepat Sasaran.	Nominal

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

## F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak 34%-66%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. 1%-33%.

#### **A. Efektifitas**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 34%-100%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 33%-100%.

#### **B. Efisiensi**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 34%-100%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 33%-100%.

#### **C. Kecukupan**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 67%-100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 34%-100%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 33%-100%.

#### **D. Pemerataan**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala 67%-100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala 34%-100%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala 33%-100%.

#### **E. Responsivitas**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 67%-100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 34%-100%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 33%-100%.

#### **F. Ketepatan**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 67%-100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 34%-100%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 33%-100%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Bagaimana Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi : Program Bantuan Rumah di Desa Benteng Hulu).

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk penelitian populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada pada daerah Kabupaten Siak, Kecamatan Mempura, Desa Benteng Hulu. Alasan penulis memilih lokasi penelitian adalah dikarenakan program tentang penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan rumah layak huni, masih banyak masyarakat yang belum dapat program tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan dijadikan sebuah penelitian.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Camat Mempura Kabupaten Siak, dan sampel Masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni di Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.

Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai populasi dan sampel yang penulis gunakan pada penelitian ini, maka penulis menyajikannya pada tabel dan adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi:

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Program Tim Pelayanan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persen
1	Camat Mempura Kabupaten Siak O.K Mohd Rendra Dharma Putra, S.STP	1	1	100%
2	TIM Penanggulangan Kemiskinan	1	1	100%
3	Masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni dari total Jumlah Masyarakat yang di Targetkan oleh kecamatan Mempura Kabupaten Siak.	352	55	16%

<b>Jumlah</b>	<b>354</b>	<b>57</b>	<b>16%</b>
---------------	------------	-----------	------------

*Sumber : Camat Mempura, 2019*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kecamatan Mempura dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk Masyarakat digunakan teknik Purposive Sampling, pemilihan sample dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis.

Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Dokumentasi Hasil Observasi.
- c. Dokumentasi Pengisian Angket dan Wawancara.



- d. Tanggapan responden tentang Kinerja Camat Mempura Dalam Mengkoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak ataupun dari kantor Kepala Desa Benteng Hulu. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Kantor Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan Juga Desa Benteng Hulu.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

### a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Rumah Di Desa Benteng Hulu)

### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di

bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

d. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain-lain. Namun tidak bisa semua yang berkaitan dengan indikator variabel bisa di dokumentasi.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.3 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak,

Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
Ujian Proposal							■																	
Revisi Proposal											■													
Kuisisioner											■													
Rekomendasi survey											■													
Survey Lapangan												■												
Analisis data															■									
Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																■								
Konsultasi Revisi Skripsi																			■					
Ujian Konferehensif Skripsi																				■				
Revisi Skripsi																							■	
Pengandaan Skripsi																								■

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kabupaten Siak sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dengan luas wilayah yaitu 8.556,09 km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10° 16' 30" - 00° 20' 49" lintang selatan dan 100° 54' 21" - 102° 10' 59" bujur timur.

Adapun batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis

Secara administrative berdasarkan data tahun 1999 yang merupakan tahun kelahiran Kabupaten Siak yang awalnya memiliki 3 Kecamatan pembentuk yaitu Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Minas. Namun dengan berjalannya waktu sampai 2016 Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan. Dari sisi topografi, Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dengan ketinggian 0 - 0,5 mdpl, meliputi antara tepian sungai dan rawa serta terbentuk endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0° - 3° atau bisa dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50 m – 150 m dari daerah sekitarnya, dengan kemiringan 3° - 15° dan beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 25°C - 32°C.

Kondisi tanah didominasi oleh tanah organosol dan gley humus dengan bahan induk pembentuk jenis tanah ini adalah alluvial yang dimanifestasikan dalam bentuk rawa – rawa dan bergambut. Jenis tanah seperti ini .....dung asam dan miskin akan unsur hara namun

baik untuk pertanian tanaman lahan basah dan lahan kering seperti padi, kelapa, karet, kopi, dan sawit.

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Siak pada umumnya memiliki iklim tropis basah dipengaruhi oleh sifat-sifat iklim laut. Musim hujan berlangsung pada bulan September sampai bulan Januari dimana matahari berada pada belahan bumi bagian selatan dan angin bertiup dari arah barat daya dan barat laut. Musim kemarau berlangsung pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus mana matahari berada belahan bumi bagian utara dan angin bertiup dari arah timur laut dan tenggara. Curah hujan antara 900 mm sampai dengan 1.500 mm setiap tahunnya dengan jumlah hari hujan antara 40 sampai 110 hari. Suhu rata-rata terendah sebesar 26°C dengan kelembapan udara rata-rata 85%.

Di wilayah Kabupaten Siak terdapat beberapa sungai dengan sungai terbesar adalah sungai Siak yang melalui Kecamatan Siak yang mengalir dari barat ketimur yang membelah dua wilayah Kabupaten Siak. Sungai-sungai lainnya yang ada di Kabupaten Siak adalah Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Mempura, Sungai Rawa, Sungai Buatan dan Sungai Sam-Sam yang ada di Kecamatan Kandis. Keberadaan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Siak sangat strategis terutama perannya yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana perhubungan dan aktifitas perekonomian maupun sosial. Disamping itu keberadaan sungai-sungai tersebut juga dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk untuk mandi dan mencuci.

Berdasarkan kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Siak, bahwa pada saat ini sebagian penghasilan masyarakat didapat dari sektor perkebunan dan tanaman pangan yaitu komoditi padi, kelapa sawit, kelapa dan karet. Berdasarkan analisis fisik kawasan ternyata lahan yang ada dan sesuai bagi perkembangan kegiatan tersebut diatas cukup besar maka perlu usaha yang lebih optimal untuk meningkatkan kegiatan disektor tanaman pangan dan perkebunan tersebut, sehingga pendapatan masyarakat lebih meningkat lagi. Bila dilihat dari potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Siak mempunyai tambang yang potensial bagi

pemasukan pendapatan daerah, yaitu dari pertambangan minyak bumi. Walaupun demikian sesuai fakta yang ada ternyata ada yang perlu diperhatikan yaitu model pengolahannya sehingga potensi tersebut dapat menunjang perkembangan Kabupaten Siak dan bermanfaat bagi penduduk terutama terhadap perkembangan fisik kawasan.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Siak berdasarkan data profil Kabupaten Siak tahun 2002 menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang ada merupakan kawasan hutan dengan luas 410.455 ha atau 50,38% dari luas lahan yang ada. Penggunaan lahan lainnya adalah sawah dengan luas 20.507 Ha atau 2,40% yang terdiri dari sawah sederhana PU seluas 173 Ha, sawah tadah hujan seluas 10.893 Ha dan sawah yang tidak diusahakan seluas 9.441 Ha dan luas lahan perkebunan adalah 289.158 ha atau 35,43% dari luas lahan kabupaten Siak. Sedangkan penggunaan lahan yang luasnya <3% berupa danau, lahan terbuka, mangrove, pemukiman, rawa, sawah, semak sungai dan tambak.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang diharapkan sebagai motor penggerak pembangunan khususnya pembangunan ekonomi baik diperdesaan maupun perkotaan. Sebagai penggerak ekonomi, penduduk tidak hanya dilihat dari segi kuantitasnya saja akan tetapi juga dari segi kualitasnya terutama penduduk pada usia produktif merupakan tenaga kerja potensial dari suatu daerah. Adapun persebaran penduduk Kabupaten Siak sebagai berikut :

**Tabel IV.1 : Penyebaran Populasi Penduduk Kabupaten Siak Provinsi Riau**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Kecamatan Bunga Raya	20.900
2.	Kecamatan Dayun	26.600
3.	Kecamatan Kandis	55.311
4.	Kecamatan Kerinci Kanan	22.900
5.	Kecamatan Koto Gasib	18.600

6.	Kecamatan Siak	21.400
7.	Kecamatan Sabak Auh	9.900
8.	Kecamatan Tualang	104.000
9.	Kecamatan Minas	21.384
10.	Kecamatan Sungai Apit	25.000
11.	Kecamatan Pusako	5.100
12.	Kecamatan Lubuk Dalam	17.000
13.	Kecamatan Sungai Mandau	7.200
14.	Kecamatan Mempura	14.100

Sumber : Sensus Penduduk Pemerintah Indonesia tahun 2016

Berdasarkan table diatas persebaran penduduk di Kabupaten Siak tidak merata yang ditentukan dengan pola mata pencaharian. Kecamatan Tualang merupakan kecamatan terpadat karena memiliki pabrik kertas terbesar yaitu PT. Indah Kiat yang menjadikan Kecamatan Tualang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada Kecamatan Lain. Sedangkan Kecamatan Kandis merupakan Kecamatan dengan kepadatan kedua, Kecamatan Kandis dan Kecamatan menempati urutan kepadatan ke Sembilan dipengaruhi oleh perkebunan sawit dan merupakan daerah perlintasan jalan lintas Sumatra. Adapun daerah dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Mandau.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu), jadi data-data yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat dengan menyebarkan kuesioner masing-masing berjumlah 55 sampel, serta melakukan wawancara dengan Camat Mempura, Kepala Sub. Bagian Program, Kepala Desa Benteng Hulu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu), maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya penulis untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Kriteria usia yang penulis tentukan yang dijadikan sebagai sampel adalah orang yang sudah memiliki pemikiran yang sudah dewasa dan bisa memilah yang terbaik. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

##### 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi : Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng



Hulu), serta dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin berikut:

**Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	29	53%
2	Perempuan	26	47%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bnatuan Rumah Di Desa Benteng Hulu) adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 29 orang dengan persentase 53%, sedangkan untuk responden perempuan berjumlah 26 orang dengan persentase 47% Total keseluruhan responden mencapai 55 Orang responden.

## **2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia**

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin mateng usia seseorang maka cara berfikirnyapun tentunya sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu), serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	29	53%
3	41-50 Tahun	24	43%
4	>50 Tahun	2	4%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.2 di atas dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat Kecamatan Mempura, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun dengan jumlah 29 orang dengan persentase 53% dan usia pada 41-50 Tahun yang berjumlah 24 orang dengan persentase 43%, dan usia >50 Tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 4% dari total keseluruhan jumlah pegawai 55 orang.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya, rata-rata responden masyarakat memiliki pendidikan SMA. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi:Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu), serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel V.3 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%

2	SMP	0	0%
3	SMA	40	73%
4	Diploma	8	15%
5	Sarjana S1/S2	7	13%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Masyarakat adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi:Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu) dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 40 orang (73%), responden yang memiliki pendidikan Diploma berjumlah 8 orang (15%), sedangkan responden yang paling minim memiliki pendidikan Sarjana S1/S2 yaitu berjumlah 7 orang (13%).

**B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu).**

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong (2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu) adalah berdasarkan teori dari Dunn (dalam Subarsono, 2013:126). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari

indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator Efektivitas maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan baik di kantor Camat Mempura. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam tabel:

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan rumah layak huni, (2) Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap rumah bantuan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, dan dapat memberikan efek maka dapat dikatakan efektif.

Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan rumah layak huni, Melakukan pemeriksaan Secara Langsung terhadap rumah bantuan.

**Tabel V.4 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan rumah	7 (13%)	40 (73%)	8 (14%)	55 (100%)

	layak huni				
2	Melakukan pemeriksaan Secara Langsung terhadap rumah bantuan.	4 (7%)	38 (69%)	13 (24%)	55 (100%)
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>78</b>	<b>21</b>	<b>110</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>55</b>
	<b>Persentase</b>	<b>9%</b>	<b>71%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.4 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Masyarakat Mempura yang ada pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 39 orang dan persentasenya adalah 71%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 11 orang dengan persentase 20%. Dan yang paling minim adalah masyarakat yang memberikan respon pada kategori “Baik” yaitu rata-rata yang menjawab 5 orang responden dengan persentase 9%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak masyarakat menilai bahwa pemerintahan Kecamatan Mempura sudah cukup baik dalam memberikan sosialisasi dan melakukan pemeriksaan secara langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan rumah layak huni.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis juga akan memberikan jawaban dari Key Informan penulis yang berasal dari pihak-pihak pemerintahan terkait seperti Pemerintahan Kecamatan ataupun Pemerintahan Desa yang mengetahui dengan jelas pelaksanaan Program pemberian bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana untuk mengetahui secara pasti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing *Key Informan* dengan pertanyaan

yang tentunya berkaitan dengan indikator yang dibahas diatas, maka dapat dilihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Tentunya sosialisasi kita pernah laksanakan, hal ini kita koordinasikan dengan masing-masing stakeholder, baik itu ketua RW dan RT nya, maupun tetua masyarakat adat yang ada di masing-masing Desa, kita musyawarahkan dengan masyarakat yang memegang kepentingan di masing-masing Desa, dan diluar hasil musyawarah yang telah dilakukan, kita tentunya melihat situasi langsung dilapangan, mana-mana saja masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni yang sedang di programkan oleh pemerintah” (Wawancara 20 Maret 2019, Dengan Bapak O.K Mohd Rendra Dharma Putra)

Selain dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari bapak O.K Rendra Dharma Putra di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan key informan lainnya yaitu Bapak, Bambang Hermanto, S.Sos selaku bagian dari TIM Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana tanggapa yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Tentunya dilakukan, itu menjadi hal wajib yang harus dilakukan untuk melaksanakan proses program seperti ini, tujuannya ya agar pemangku kepentingan di masing-masing desa bisa memberikan data dan juga informasi lainnya terkait dengan kondisi di masing-masing daerahnya, setelah kita mendapatkan data tersebut, nantinya kita akan terjun langsung kelapangan untuk melihat situasinya” (Wawancara 22 Maret 2019, Bpk. Bambang Hermanto, S.Sos)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis memang menemukan fakta bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura mengaku mengetahui bahwa ada program bantuan rumah layak huni yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, meskipun ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan tidak bersifat langsung, melainkan hanya melalui pendataan dan pemberitahuan ke orang yang dianggap layak menerima bantuan tersebut, dengan demikian maka setelah penulis melakukan proses pencocokan

dengan hasil wawancara dan juga fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa proses tersebut memang sudah cukup terlaksana.

## 2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Efisiensi” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)**

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Ketersediaan anggaran/biaya dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan	17 (31%)	32 (58%)	6 (11%)	55 (100%)
2	Menyelesaikan rumah bantuan dengan tepat waktu	1 (2%)	41 (74%)	13 (24%)	55 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>73</b>	<b>19</b>	<b>110</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>55</b>
<b>Persentase</b>		<b>16%</b>	<b>68%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.5 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Masyarakat Mempura yang ada pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 37 orang dan persentasenya adalah 68%, sedangkan reponden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 9 orang dengan persentase 16%. Dan masyarakat yang memberikan respon pada kategori “Baik” yaitu rata-rata yang menjawab 9 orang responden dengan persentase 16%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak masyarakat menilai bahwa anggaran suah tersedia untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tetapi belum cukup efisien dalam menyelesaikan program rumah bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu di daerah Kecamatan Mempura.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis juga akan memberikan jawaban dari *Key Informan* penulis yang berasal dari pihak-pihak pemerintahan terkait seperti Pemerintahan Kecamatan ataupun Pemerintahan Desa yang mengetahui dengan jelas pelaksanaan Program pemberian bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana untuk mengetahui secara pasti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing *Key Informan* dengan pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan indikator yang dibahas diatas, maka dapat dilihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Sejauh ini yang menjadi kendala memang anggaran yang masih terbatas, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita memfokuskan program ini memang kepada masyarakat yang benar-benar menjadi prioritas atau bisa dikatakan masyarakat yang tingkat ekonominya memang dibawah garis kemiskinan, dan proses pembangunannya sudah berjalan dan sudah ada beberapa rumah yang dapat diselesaikan dengan baik, dan dokumentasinya nanti dapat saudara ambil salinannya untuk dokumentasi tambahan dalam penelitian saudara ” (Wawancara 20 Maret 2019, Dengan Bapak O.K Mohd Rendra Dharma Putra )

Selain dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari bapak O.K Rendra Dharma Putra di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan key informan lainnya yaitu Bapak,



Bambang Hermanto, S.Sos selaku bagian dari TIM Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana tanggapa yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Program ini dibentuk tentunya melalui perencanaan yang matang, apabila tim sudah dibentuk dan turun lapangan, maka itu menandakan program tersebut sudah di dukung dengan dana anggaran yang telah di setuju oleh pemerintah Kabupaten” (Wawancara 22 Maret 2019, Bpk. Bambang Hermanto, S.Sos)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa pelaksanaan penyelesaian bangunan rumah terhadap masyarakat kurang mampu atau dibawah garis kemiskinan memang sudah dilaksanakan di beberapa titik rumah, tetapi hal ini belum berjalan dengan merata, dimana penulis menemukan fakta lain bahwa masih banyak rumah masyarakat yang memang masih membutuhkan bantuan untuk pembangunan rumah mereka.

### 3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indicator yang ke tiga yaitu indicator yang membahas tentang “Kecukupan” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.6 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Menyediakan SDM atau tim dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan	8 (15%)	37 (67%)	10 (18%)	55 (100%)
2	Rumah bantuan memiliki kualitas layak huni	11 (20%)	28 (51%)	16 (29%)	55 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>110</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>55</b>
<b>Persentase</b>		<b>16%</b>	<b>60%</b>	<b>24%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.6 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Masyarakat Mempura yang ada pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 33 orang dan persentasenya adalah 60%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 13 orang dengan persentase 24%. Dan masyarakat yang memberikan respon pada kategori “Baik” yaitu rata-rata yang menjawab 9 orang responden dengan persentase 16%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tanggapan yang paling dominan dari jawaban yang diberikan oleh masyarakat di Desa Benteng Hulu adalah jawaban pada kategori “Cukup Baik”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis juga akan memberikan jawaban dari *Key Informan* penulis yang berasal dari pihak-pihak pemerintahan terkait seperti Pemerintahan Kecamatan ataupun Pemerintahan Desa yang mengetahui dengan jelas pelaksanaan Program pemberian bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana untuk mengetahui secara pasti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing *Key Informan* dengan pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan indikator yang dibahas diatas, maka dapat dilihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Kita memiliki tim utk ini, dimana tim tersebut tentunya masih berasal dari internal pegawai kita yang juga memiliki pekerjaan secara regular di pelayanan

masyarakat, dan jika memang ada permasalahan ataupun urusan yang berkaitan dengan program ini, maka tim-tim inilah nantinya yang akan bertanggung jawab, kalau tim yang khusus menangani permasalahan rumah layak huni saja, tanpa ada pekerjaan lainnya, itu kita tidak punya. Karna kita memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas jumlahnya di kantor ini. ” (Wawancara 20 Maret 2019, Dengan Bapak O.K Mohd Rendra Dharma Putra)

Dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat, penulis juga menanyakan perihal dengan pembangunan rumah apakah sudah layak huni atau justru hanya perbaikan pada bagian-bagian tertentu saja, dan untuk mengetahui jawaban yang diberikan oleh *Key Informan* penulis, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan beliau dibawah ini:

“Pastinya layak huni, kita fokuskan kepada rumah-rumah yang memang kondisinya memprihatinkan dan memang sudah darurat, kita bangun ulang, dimana rumah ini akan dibangun dengan bentuk yang lebih baik dan tentunya permanen ataupun semi permanent, dan apabila ada rumah yang memang dapat di renovasi, maka kita akan melakukan renovasi saja, dan hal itu harus melalui musyawarah dahulu dengan pemilik rumah, apakah mereka bersedia atau tidak untuk rumahnya di renovasi oleh Pemerintah” (Wawancara 20 Maret 2019, Dengan Bapak O.K Mohd Rendra Dharma Putra)

Selain dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari bapak O.K Rendra Dharma Putra di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan key informan lainnya yaitu Bapak, Bambang Hermanto, S.Sos selaku bagian dari TIM Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana tanggapa yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Untuk TIM yang dibentuk, saya menjadi salah satu tim penanggulangan kemiskinan yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus dan mengawasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan dari program Bantuan Rumah Layak Huni ini.” (Wawancara 22 Maret 2019, Bpk. Bambang Hermanto, S.Sos)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak terhadap masing-masing rumah yang ada di Kecamatan dan Desa-Desa memang sudah memenuhi standar rumah layak huni, dan beberapa rumah yang di

bangun adalah bangunan permanent dan juga Semi Permanen baik dengan pembangunan total ataupun hasil renovasi dari rumah sebelumnya.

#### 4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Suatu pelaksanaan program bisa dapat dikatakan efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Jadi pemerataan berpatokan pada keadilan dan kewajaran. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

**Tabel V.7 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)**

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan survery untuk memastikan kondisi rumah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan	7 (13%)	39 (71%)	9 (16%)	55 (100%)
2	Program rumah layak huni dilaksanakan dengan adil dan merata	15 (27%)	33 (60%)	7 (13%)	55 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>72</b>	<b>16</b>	<b>110</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>11</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>55</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>65%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Masyarakat Mempura yang ada pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 36 orang dan persentasenya adalah 65%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” adalah rata-rata 11 orang dengan persentase 20%. Dan masyarakat yang memberikan respon jawaban mereka pada kategori “Kurang Baik” yaitu dengan jumlah rata-rata yang menjawab memiliki jumlah sebanyak 8 orang responden dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan di atas, maka penulis juga akan memberikan jawaban dari *Key Informan* penulis yang berasal dari pihak-pihak pemerintahan terkait seperti Pemerintahan Kecamatan ataupun Pemerintahan Desa yang mengetahui dengan jelas pelaksanaan Program pemberian bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana untuk mengetahui secara pasti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing *Key Informan* dengan pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan indikator yang dibahas di atas, maka dapat dilihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Sudah, dan itu wajib dilakukan, tidak mungkin kita menentukan pembangunan terhadap suatu rumah apabila kita tidak melihat kondisi rumah tersebut terlebih dahulu, bagaimana kita akan tau apa saja yang dibutuhkan, pastinya dilakukan survey secara rinci dan riset-riset lainnya, dan ini dilakukan secara adil pastinya, saya sendiri bisa memastikan itu, tidak ada orang berada atau orang mampu yang mendapatkan bantuan ini, semuanya memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan bantuan dan dibawah garis kemiskinan, saya bisa pastikan hal tersebut” (Wawancara 20 Maret 2019, Dengan Bapak O.K Mohd Rendra Dharma Putra)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa memang pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui masing-masing Kecamatan dan Desa nya

sudah melalui tahapan riset terlebih dahulu, dimana proses survey memang dilakukan oleh tim-tim dimasing-masing Kecamatan dan juga Desa yang diberikan bantuan.

## 5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

**Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program	5 (9%)	20 (36%)	30 (55%)	55 (100%)
2	Melakukan evaluasi kerja, baik terhadap tim maupun fisik pembangunan	10 (18%)	25 (45%)	20 (37%)	55 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>110</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>8</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>55</b>
<b>Persentase</b>		<b>15%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.8 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Masyarakat Mempura yang ada pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata

sebanyak 25 orang dan persentasenya adalah 45%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata berjumlah sebanyak 22 orang dengan persentase 40%. Dan masyarakat yang memberikan respon pada kategori “Baik” yaitu rata-rata yang menjawab 8 orang responden dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Kurang Baik”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan di atas, maka penulis juga akan memberikan jawaban dari *Key Informan* penulis yang berasal dari pihak-pihak pemerintahan terkait seperti Pemerintahan Kecamatan ataupun Pemerintahan Desa yang mengetahui dengan jelas pelaksanaan Program pemberian bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana untuk mengetahui secara pasti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing *Key Informan* dengan pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan indikator yang dibahas di atas, maka dapat dilihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Semua masyarakat kita libatkan dalam proses perencanannya, kita undang RT/RW, Pemegang kepentingan ditengah masyarakat, baik itu tetua adat, perwakilan masyarakat lainnya dan juga pemuka agama juga kita panggil untuk proses musyawarah dalam pelaksanaan perencanaan program ini, jadi kita melibatkan semua stakeholder sebelum benar-benar memutuskan kebijakan apa yang akan kita ambil dalam upaya mensukseskan program ini, dan dalam proses pengawasan juga demikian, kita semua terlibat dalam pengawasan dari program ini, jika memang ada hal yang melanggar regulasi, silahkan dilaporkan agar bisa di tindak lanjuti.” (Wawancara 20 Maret 2019, Dengan Bapak O.K Mohd Rendra Dharma Putra)

Selain dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari bapak O.K Rendra Dharma Putra di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan key informan lainnya yaitu Bapak, Bambang Hermanto, S.Sos selaku bagian dari TIM Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana tanggapa yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Masyarakat tentunya terlibat langsung dalam proses pembangunan, perencanaan, dan penetapan siapa saja masyarakat yang layak untuk mendapatkan rumah bantuan tersebut, nantinya akan dilakukan rapat di masing-masing desa dengan mengundang beberapa pemangku kepentingan dimasing-masing desa, mulai dari RT, RW, Kepala Adat, yang dituakan, dan perwakilan dari perempuan di masing-masing Desa” (Wawancara 22 Maret 2019, Bpk. Bambang Hermanto, S.Sos)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa memang proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan mempura terhadap proses pelaksanaan program ini memang melibatkan seluruh stakeholder masyarakat di masing-masing Desa yang diberikan bantuan program rumah layak huni Kabupaten Siak.

## 6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan pembangunan dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif untuk dijadikan rekomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif karena ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ketepatan yang harus diperhatikan dalam melakukan pelaksanaan program ini adalah waktu pelaksanaanya, tujuan dari pelaksanaan, pemerataan pelaksanaan program, serta dampak dari pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni yang akan di capai. Jika ketiga hal tersebut sudah tepat maka dapat dikatakan program terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

**Tabel V.9 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)**



No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan program sesuai dengan aturan yang berlaku	11 (20%)	31 (56%)	13 (24%)	55 (100%)
2	Program rumah layak huni tepat sasaran	5 (9%)	39 (71%)	11 (20%)	55 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>70</b>	<b>24</b>	<b>110</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>8</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>55</b>
<b>Persentase</b>		<b>15%</b>	<b>63%</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Masyarakat Mempura yang ada pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata berjumlah sebanyak 35 orang dengan persentasenya adalah mencapai 63%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 12 orang dengan persentase 22%. Dan masyarakat yang memberikan respon pada kategori “Baik” yaitu rata-rata yang menjawab 8 orang responden dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis juga akan memberikan jawaban dari *Key Informan* penulis yang berasal dari pihak-pihak pemerintahan terkait seperti Pemerintahan Kecamatan ataupun Pemerintahan Desa yang mengetahui dengan jelas pelaksanaan Program pemberian bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana untuk mengetahui secara pasti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing *Key Informan* dengan pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan indikator yang dibahas diatas, maka dapat dilihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Seperti yang saya katakan tadi, kita melibatkan masyarakat dalam perencanaan program ini, dan untuk pemilih siapa yang berhak mendapatkan bantuan ini juga melibatkan masyarakat setempat, tetua adat, RT/RW, Kepala Desa, dan juga lainnya, jadi apabila memang tidak tepat sasaran dan menyalahi aturan, pastinya masyarakat yang duluan brontak, jadi saya rasa, program ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara 20 Maret 2019, Dengan Bapak O.K Mohd Rendra Dharma Putra)

Selain dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari bapak O.K Rendra Dharma Putra di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan key informan lainnya yaitu Bapak, Bambang Hermanto, S.Sos selaku bagian dari TIM Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dimana tanggapa yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Sudah sesuai, sampai dengan saat ini, pelaksanaan program yang kita jalankan sudah sesuai dengan ketentuan SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika memang ada pelanggaran, tentunya saya akan mendapatkan sanksi dari pemerintah maupun Hukum” (Wawancara 22 Maret 2019, Bpk. Bambang Hermanto, S.Sos)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mempura sudah melalui musyawarah dengan para stakeholder di masing-masing Desa, dan masyarakat yang penulis temui juga memberikan tanggapan mereka bahwa program penentuan siapa yang berhak menerima rumah bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari masyarakat tersebut, tetapi yang menjadi kendala adalah lamanya proses penyelesaian program tersebut.

### **C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu).**

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Efektivitas” kemudian indikator yang kedua adalah “Efisiensi”, indikator ke tiga “Kecukupan” dan indikator ke empat adalah “Pemerataan”, dan indikator yang ke lima

adalah “Responsivitas” , serta indikator yang ke enam adalah “Ketepatan” dan didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan baik yang mana dalam melakukan observasi penulis melakukannya di Kecamatan Mempura khususnya di Desa Benteng Hulu.

Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuesioner dari ke-enam indikator maka, dapat dibuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel pada indikator, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden. Jadi ke-enam indikator ini di jabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarkan dengan masyarakat untuk melengkapi pembahasan hasil penelitian, hasil rekapitulasinya yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.10 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Mempura Terkait Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi:Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu)**

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	5 (9%)	39 (71%)	11 (20%)	55 (100%)
2	Efisiensi	9 (16%)	37 (68%)	9 (16%)	55 (100%)
3	Kecukupan	9 (16%)	33 (60%)	13 (25%)	55 (100%)
4	Pemerataan	11 (20%)	36 (65%)	8 (15%)	55 (100%)
5	Responsivitas	8 (15%)	22 (40%)	25 (45%)	55 (100%)
6	Ketepatan	8 (15%)	35 (63%)	12 (22%)	55 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>202</b>	<b>78</b>	<b>330</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>8</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>55</b>
<b>Persentase</b>		<b>15%</b>	<b>62%</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.10 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung terhadap Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi:Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu), dengan menggunakan teori sebagai tolak ukur, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan, maka di peroleh rata-rata responden memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” yaitu 34 orang responden dengan persentase (62%), dan pada kategori “Kurang Baik” responden yang memberikan tanggapan rata-rata 13 orang responden dengan persentase (23%), dan untuk tanggapan responden pada kategori “Baik” rata-rata memberikan respon 8 orang dengan persentase (15%).

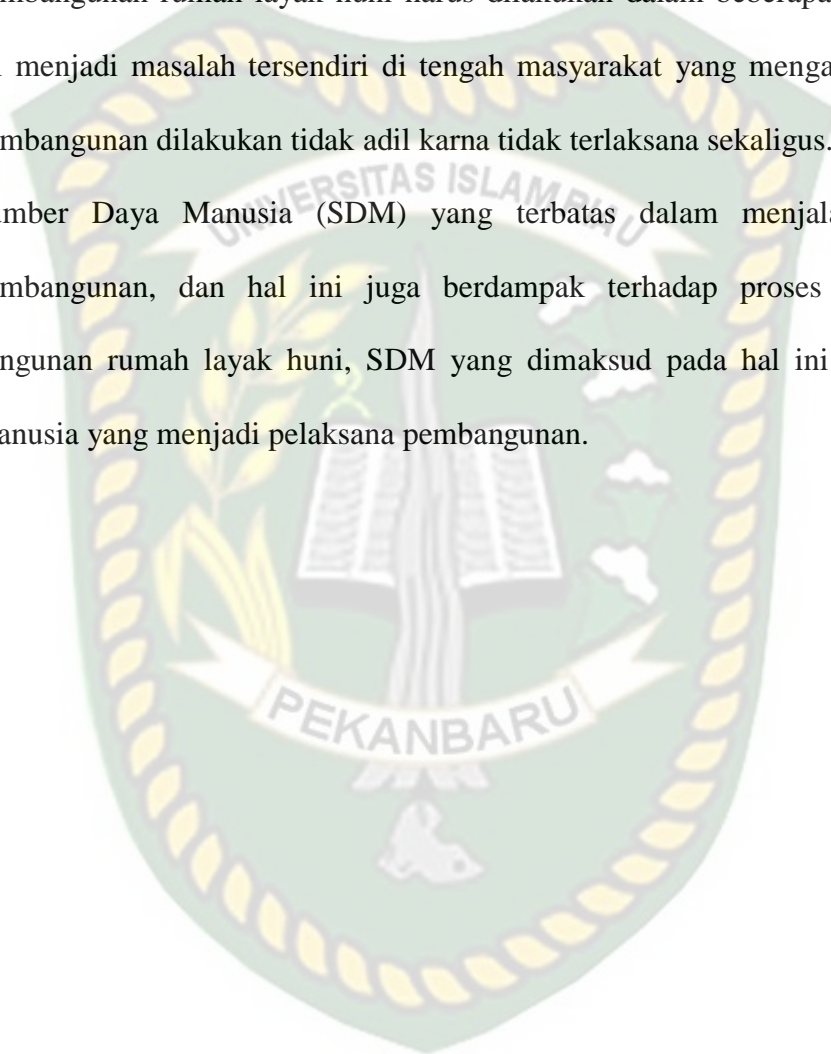
Adapun jawaban yang telah di dapatkan diatas memiliki alasan yang secara ilmiah berkaitan dengan keseluruhan jawaban yang ada pada masing-masing indikatornya, dimana dari keseluruhan indikator yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, ada beberapa yang sudah di jalankan oleh Pemerintah Kecamatan Mempura, dan beberapa indikator tidak berjalan secara maksimal, contoh dari permasalahan program yang belum berjalan secara maksimal adalah ketersediaan anggaran yang memang menjadi kendala, Penyelesaian Rumah Layak Huni yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, pelaksanaan pembangunan tidak merata dalam 1 (Satu) periode, dan permasalahan-permasalahan seperti itu menjadi salah satu alasan mengapa jawaban kesimpulan pada penelitian ini ada pada kategori “Cukup Baik”.

#### **D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dalam Menjalankan Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu.**

Dalam menjalankan program yang berkaitan dengan masyarakat luas dan bersifat fisik, maka kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan tentunya akan memiliki beberapa kendala yang jadi faktor penghambat dalam menjalankan proses

pelayanan tersebut, salah satunya adalah pelayanan dibidang penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mempura dalam Program Bantuan Rumah Layak Huni, dan adapun faktor penghambat yang di alami adalah sebagai berikut ini:

1. Pembiayaan pembangunan yang tidak dapat berjalan dalam satu tahap, sehingga pembangunan rumah layak huni harus dilakukan dalam beberapa tahapan, dan ini menjadi masalah tersendiri di tengah masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan dilakukan tidak adil karna tidak terlaksana sekaligus.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dalam menjalankan proses pembangunan, dan hal ini juga berdampak terhadap proses penyelesaian bangunan rumah layak huni, SDM yang dimaksud pada hal ini adalah SDM Manusia yang menjadi pelaksana pembangunan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dengan *key informan* dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuisisioner. adapun kesimpulan secara keseluruhan penelitian ini adalah berada pada kategori “Cukup Baik”.
2. Dalam menjalankan program yang berkaitan dengan masyarakat luas dan bersifat fisik, maka kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan tentunya akan memiliki beberapa kendala yang jadi faktor penghambat dalam menjalankan proses pelayanan tersebut, salah satunya adalah pelayanan dibidang penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mempura dalam Program Bantuan Rumah Layak Huni, dan adapun faktor penghambat yang di alami adalah Pembiayaan pembangunan yang tidak dapat berjalan dalam satu tahap, sehingga pembangunan rumah layak huni harus dilakukan dalam beberapa tahapan, dan ini menjadi masalah tersendiri di tengah masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan dilakukan tidak adil karna tidak terlaksana sekaligus, serta sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dalam menjalankan proses pembangunan, dan hal ini juga berdampak terhadap proses penyelesaian bangunan rumah layak huni, SDM yang dimaksud pada hal ini adalah SDM Manusia yang menjadi pelaksana pembangunan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak Pemerintahan Kecamatan, khususnya bidang yang menangani pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Serta kepada masyarakat yang menerima bantuan. dan saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Kecamatan Mempura agar melakukan pembangunan secara merata dan adil terhadap masyarakat yang memang sudah di nyatakan layak untuk mendapatkan bantuan, penulis tentunya berharap kepada tim analisis agar dalam menentukan masyarakat yang layak atau tidak bersikap jujur dalam memberikan penilaian, agar masyarakat merasa mendapatkan keadilan dan pelaksanaan tersebut di dukung dengan anggaran yang tersedia dan mencukupi untuk melaksanakan pembangunan yang telah dijanjikan Pemerintah kepada masyarakat.
2. Penulis menyarankan kepada pengurus Kecamatan khususnya yang menangani program pembangunan rumah layak huni agar mengoptimalkan pembangunan dengan penyelesaian pembangunan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah di janjikan kepada masyarakat di Kecamatan Mempura, dengan demikian, maka penulis menyarankan agar Sumber Daya Manusia yang ada di dalam tim penanggulangan kemiskinan di tambah jumlahnya agar pembangunan dapat dilakukan secara merata dan serentak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S Ruky,2001, Sistem Manajemen Kinerja. Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima, Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta
- AG.Subarsono .2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad,abdul Karim.H. 2007. *Media Pembelajaran* : Makassar: UNM
- Al-Amin, Mufham (2006). Manajemen Pengawasan. Jakarta: Kalam Indonesia
- Anwar Prabu Mangkunegara.2005.*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Arsyad, Azhar. 2004. *Media Pembelajaran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Badudu, J. S, Sutan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,
- Dessler Gary, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta :Edisi Kesepuluh Jilid Dua PT Indeks halaman 46.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta
- Handoko,T.Hani. 2003. *Manajemen*, Yogyakarta :BPFE Yogyakarta
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Harahap, Sofyan Safri, 2003. *Teori Akuntansi*, Edisi Kelima, Jakarta :PT. Raspindo.
- Hariandja, Marihot T.E, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah,Edisi Revisi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Musaneff.1992. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*.Jakarta: PT. Gunung Agung
- Ndraha Taliziduhu, 1987. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta; Rineka Cipta
- Ndraha Taliziduhu, 2003. *Kybernolog 97 (Pemerintahan Baru)*. Jakarta; Rineka Cipta
- Ndraha Taliziduhu, 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta; Rineka Cipta



- Ndraha.2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I*.Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pasolong, Harbani , 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, Harbani, 2007.*Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Rivai, Veithzal, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung:Penerbit Mandar Maju
- Siagian, Sondang P, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi I, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta : Bumi Aksara.
- Silalahi Ulber, 2012. *Metode penelitian Sosial*. Bandung, Refika Aditama.
- Siti, Syamsiar.2002. *Pengaruh Pengadaan Bahan Baku. Pengolahan Pemasaran dan Kewirausahaan Terhadap Kinerja perusahaan dalam Menciptakan Nilai Tambah: UNPAD Bandung*.
- Sofian Syafri Harahap, 2003. *Teori Akutansi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2003.*Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto,Edi.2006.*Membangun Masyarakat Membangun Rakyat: Kajian Stregis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.Bandung: Refika Aditama
- Syafi'i.M. 2005. *Panduan Membuat Aplikasi Database dengan PHP 5*. Yogyakarta: Andi Offset
- Usman, Husaini. 2014. *Manajemen: 98 raktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.

#### **Dokumentasi:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 *Tentang Demokrasi dan Tugas Pembantuan*.